

MATERI DAN TRYOUT TKD WAWASAN KEBANGSAAN **BUMN**



MATERI TKD WAWASAN KEBANGSAAN BUMN

NASIONALISME

A. PENGERTIAN NASIONALISME

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme diartikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme muncul dan berkembang menjadi sebuah paham (isme) yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara, bermasyarakat dan berbudaya dipengaruhi oleh kondisi histori dan dinamika sosio kultural yang ada di masing-masing negara. Pada mulanya unsur-unsur pokok nasionalisme itu terdiri atas persamaan-persamaan darah (keturunan), suku bangsa, daerah tempat tinggal, kepercayaan agama, bahasa dan kebudayaan. Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok suku yang hidup di suatu wilayah tertentu dan masih bersifat primordial berhadapan dengan manusiamanusia yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka. Lambat laun ada unsur tambahan, yaitu dengan adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk memegang peranan dalam masyarakat (demokrasi politik dan demokrasi sosial) dan serta ada kepentingan persamaan ekonomi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah nasionalisme modern.

Dilihat dari perkembangannya, nasionalisme mula-mula muncul menjadi kekuatan penggerak di Eropa Barat dan Amerika Latin pada abad ke-18. Ada yang berpendapat bahwa manifestasi nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17, ketika terjadi revolusi Puritan. Namun dari beberapa pendapat tersebut dapat dijadikan asumsi bahwa munculnya nasionalisme berawal dari Barat (yang diistilahkan oleh Bung Karno sebagai nasionalisme Barat) yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan. Perasaan yang mirip dengan nasionalisme sudah banyak dimiliki oleh rakyat waktu itu, meskipun hanya sebatas pada individu saja (fanatisme pribadi) yang muncul jika ada bahaya yang mengganggu atau membahayakan eksistensi mereka (masyarakat koloni) atau keluarga serta

golongan mereka. Sementara munculnya nasionalisme negara-negara di kawasan Asia-Tenggara (yang menurut Bung Karno sebagai nasionalisme Timur) yang banyak dipengaruhi oleh gejala imperialisme yang dikembangkan bangsa Eropa di Negara-negara Asia. Sehingga pada dasarnya munculnya nasionalisme sebagai reaksi mendasar untuk memerangi penjajah sekaligus merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negeranya. Gerakan nasionalisme Indonesia bangkit sejak tahun 1908 namun bentuk nasionalisme yang berkembang pada saat itu kebanyakan masih bersifat kedaerahan kelompok, belum pada tataran kesatuan kenegaraan.

B. NASIONALISME DI INDONESIA

Setelah kita mengetahui bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham, maka paham tersebut harus dianalisis apakah cocok diterapkan di Indonesia atau tidak? Bila dilihat dari isinya, maka nasionalisme adalah sebuah paham yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Alasannya, paham nasionalisme ini sangat mendukung sila ketiga Pancasila yaitu, Persatuan Indonesia dan butir-butir pengamalannya yang terdiri dari:

- Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan;
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia;
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika;
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kita bisa membuat pengertian nasionalisme lebih terperinci menjadi sebuah paham yang mengajarkan seseorang untuk mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup rela berkorban, memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia demi mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. MENANAMKAN NASIONALISME DI INDONESIA

Nasionalisme adalah sebuah paham yang cocok diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menanamkan nasionalisme dalam hati dan pikiran semua bangsa Indonesia yang dapat dilakukan melalui:

- Memasukkan nasionalisme dalam pelajaran di sekolah maupun perkuliahan;
- Menayangkan acara televisi yang dapat meningkatkan semangat nasionalisme;
- Mendorong pelaku usaha melalui pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga masyarakat Indonesia tertarik membeli, menggunakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri tersebut;
- Memberikan teladan kepada masyarakat melalui kepemimpinan pejabat pemerintah yang memiliki semangat nasionalisme;

Dengan menanamkan nasionalisme dalam hati dan pikiran semua bangsa Indonesia, maka diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat, memiliki pemikiran-pemikiran cerdas dan unggul untuk memajukan Indonesia.

INTEGRITAS

A. PENGERTIAN INTEGRITAS

Secara umum integritas didefinisikan sebagai sebuah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta keyakinan. Integritas juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menatap konsistensi antara suatu tindakan dengan nilai atau prinsip. Dalam sudut pandang etika, integritas dikatakan sebagai kejujuran atau kebenaran dari setiap tindakan seseorang. Lawan kata dari integritas adalah *hipocrisy* (munafik).

Definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya.

Definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya.

Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian.

- Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati.
- Dimensi konsistensi merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan, sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya.
- Dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri.

B. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adalah:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada: Kepastian hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, kepentingan umum, dan Proporsionalitas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah Road Map yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2023. Road Map ini diharapkan akan mampu menjadi upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis.

- Road Map Komisi Pemberantasan Korupsi difokuskan pada beberapa area yang terbagi menjadi tiga fase atau tahap, yaitu:
 1. Fase I

Fase pertama Road Map KPK berlangsung dari tahun 2011-2015. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

 - Penanganan kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
 - Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*).
 - Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
 - Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
 - Persiapan *Fraud Control*.
 2. Fase II

Fase kedua Road Map KPK berlangsung dari tahun 2015-2019. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

 - Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
 - Penanganan Kasus Grand Corruption dan penguatan aparat penegak hukum.
 - Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN).
 - Implementasi *Fraud Control*.
 3. Fase III

Fase ketiga atau fase terakhir dari Road Map KPK berlangsung dari tahun 2019-2023. Dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut:

 - Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
 - Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
 - Penanganan Fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

D. SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa.

SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

1. Bagian Pondasi

Bagian ini terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya
2. Bagian pilar atau tiang penyangga Bagian ini terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sector publik, sektor keuangan, penegak

hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi antikorupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha.

3. Bagian atas

Bagian ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional.

Supaya pembangunan Sistem Integritas Nasional berjalan dengan positif maka semua pilar dalam SIN harus memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

1. Peran/kontribusi (role)

Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.

2. Transparansi dan akuntabilitas (*governance*)

Setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.

3. Kapasitas (*capacity*)

Untuk membentuk suatu Sistem Integritas Nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Transparansi anggaran.
- b. Menghindarkan konflik kepentingan.
- c. Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan.

Untuk membentuk suatu Sistem Integritas Nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

- Transparansi anggaran.
- Menghindarkan konflik kepentingan.
- Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan.

E. TIMNAS PENCEGAHAN KORUPSI

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk untuk menyelenggarakan Stranas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK. Dan dalam melaksanakan kewenangannya, Timnas

PK berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Timnas PK tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Timnas PK mempunyai tugas:

- Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; dan
- Memublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat.

F. TENTANG STRANAS PK

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur; dan
- Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis komisi pemberantasan korupsi.

G. FOKUS, TANTANGAN DAN SASARAN STRANAS PK

- Upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi, berfokus pada:
- Perizinan dan tata niaga.
- Keuangan negara, dan
- Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

BELA NEGARA

A. PENGERTIAN BELA NEGARA

Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara," dan Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Indonesia terletak di posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Posisi sangat strategis ini tentu akan mengundang ancaman juga bahaya dari luar, terlebih saat melihat limpahan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman juga bahaya maka setiap warga negara Indonesia wajib dan harus ikut serta melaksanakan upaya bela negara.

Bela negara menurut UU RI No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara pasal 1 ayat (2) yaitu *"Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan unyuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945"*. Namun di era reformasi UU RI No. 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pada undang-undang ini tepatnya pada pasal 9 tidak dijelaskan definisi Bela negara, melainkan hanya menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara serta menjelaskan ketentuan pelaksanaan upaya bela negara. Meskipun demikian pada pasal tersebut tersirat makna *"Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga"*

negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa” (Abidin, 2014: 30). Makna tersirat tersebut terlihat jelas tidak mengubah esensi dari bela negara yaitu upaya untuk mempertahankan negara dari segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketika bicara mengenai bela negara, tentu akan menyangkut perihal Ketahanan Nasional. Sunarso (2013: 200) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai *“kondisi dinamis suatu bangsa, keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya”*. Sutarman (2011: 82-83) menjelaskan hubungan/keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional meliputi:

- Pembelaan Negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Sedang Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh “keuletan” warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan “ketangguhan” warga negara dalam Ketahanan Nasional.
- Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
- Perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan karapuhan Ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keuletan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

B. DASAR HUKUM BELA NEGARA

Dasar hukum pelaksanaan bela negara di Indonesia termuat dalam berbagai aturan yaitu Batang tubuh UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR.

C. UUD 1945

- Pasal 27 Ayat 3: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara."
- Pasal 30 Ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
- Pasal 30 Ayat 2: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."
- Pasal 30 Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."
- Pasal 30 Ayat 4: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
- Pasal 30 Ayat 5: "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang."

TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara

Dalam Bab IV, ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara, melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat.

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI

Pasal 1: "Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing."

Pasal 2:

- Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara."
- Ayat 2: "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan,"

- Ayat 3: "Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama saling membantu."

TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI

Bab I tentang TNI

Pasal 1: Jati Diri TNI

- Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara."
- Ayat 2: "Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara."
- Ayat 3: "Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya."

Pasal 2: Peran TNI

- Ayat 1: "Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- Ayat 2: "Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara."

"Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang."

Bab II, tentang POLRI Pasal 6:

- Ayat 1: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memelihara, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."
- Ayat 2: "Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional."

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2: "Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 68: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 2: "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri."

Pasal 4: "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman."

Pasal 9 ayat (1): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara."

Pasal 9 ayat (2): "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- Pendidikan kewarganegaraan
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib
- Pengabdian sesuai profesi"

Pasal 9 ayat (3): "Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang."

PILAR NEGARA

A. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Apa itu Ideologi? Kenapa Pancasila sebagai ideologi bangsa?. Disini kita akan membahas tentang Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. Mulai dari Pengertian ideologi, Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia sampai dengan Sejarah perumusan Pancasila.

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan. Sedangkan Logos artinya pengetahuan. Secara sederhana Ideologi bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan.

Jadi bisa dikatakan Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dasar bertujuan untuk memberikan arah yang ingin dicapai dalam melaksanakan serta mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

2. Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia

a. Pancasila sebagai dasar negara

Tahukah kamu? Bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

- b. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia itu dapat diartikan sebagai suatu konsep dimana sistem nilai yang secara individu maupun kelompok dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara.
 - c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Republik Indonesia digunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan berbangsa. Selain itu juga, Pancasila memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
3. Tokoh Sejarah Perumusan Pancasila
- Berikut merupakan tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama.
- a. Muh.Yamin
Muh. Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan pendapat sebagai berikut:
 - > Peri kebangsaan.
 - > Peri keadilan.
 - > Peri ketuhanan.
 - > Peri kerakyatan.
 - > Kesejahteraan rakyat.
 - b. Soepomo
Sedangkan Soepomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, mence-
tuskan sebagai berikut:
 - > Persatuan
 - > Kekeluargaan
 - > Keseimbangan lahir batin
 - > Musyawarah
 - > Keadilan rakyat
 - c. Ir. Soekarno
Dan juga Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, mengusul-
kan sebagai berikut:
 - > Kebangsaan Indonesia
 - > Internasionalisme atau perikemanusiaan
 - > Mufakat atau demokrasi
 - > Kesejahteraan sosial
 - > Ketuhanan Yang Maha Esa

Usulan rumusan Pancasila dari ke-3 tokoh tersebut dibahas lebih mendalam oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang biasa disebut dengan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah piagam yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam rumusan tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut

- > Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- > Kemanusiaan yang adil dan beradab
- > Persatuan Indonesia
- > Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- > Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun, sebelum disahkannya UUD 1945, terdapat kalimat sila pertama rumusan Pancasila yang telah diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

4. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa negara memiliki arti nilai-nilai sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa
 - > Indonesia adalah negara yang mengakui adanya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa
 - > Negara melindungi setiap warga negaranya untuk beribadah menurut dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
- b. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
 - > Setiap warga negara harus mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa
 - > Mengembangkan dan menghormati sikap untuk saling mencintai antar sesama manusia
- c. Nilai-nilai persatuan Indonesia
 - > Setiap warga negara indonesia harus mengutamakan kepentingan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi serta golongan.
 - > Serta Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- d. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - > Selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
 - > Menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil musyawarah
- e. Nilai-nilai keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - > Seluruh warga negara indonesia bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- > dan juga Memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil terhadap antar-sesama manusia

5. Perbandingan Ideologi

Berikut adalah tabel perbandingan dari ideologi komunisme, ideologi liberalisme, dan ideologi Pancasila.

No	Komunisme	Liberalisme	Pancasila
1	HAM diabaikan	HAM dijunjung secara mutlak	HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban hak asasi
2	Nasionalisme ditolak	Nasionalisme diabaikan	Nasionalisme dijunjung tinggi
3	Keputusan di tangan pimpinan suara terbanyak partai	Keputusan melalui suara terbanyak atau lebih dikenal voting	Keputusan melalui Keputusan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka diadakan pemungutan suara.
4	Dominasi partai	Dominasi mayoritas	Tidak ada dominasi
5	Tidak ada oposisi	Ada oposisi	Ada oposisi dengan alasan (sebagai penyeimbang)
6	Tidak ada Perbedaan Pendapat	Ada perbedaan pendapat	Ada perbedaan pendapat, dan dihargai
7	Kepentingan negara	Kepentingan mayoritas	Kepentingan Masyarakat

6. Sikap Positif terhadap Pancasila

Berikut adalah beberapa sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat

- a. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berpolitik
 - > Mengemukakan pendapat secara bebas serta bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan
 - > Menjalankan pemerintahan secara jujur dan konsekuen.
- b. Memiliki Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi
 - > Memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan benar.
 - > Menjalankan kegiatan perekonomian secara baik dan jujur.
- c. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan lokal
 - > Menghormati dan menghargai sesama umat manusia tanpa melihat asal usul, agama, serta ras, dan latar belakang kehidupannya.
 - > Bersikap adil dan tidak mengambil hak milik orang lain.

B. Undang-Undang Dasar 1945

Materi kali ini akan membahas tentang uud 1945, mulai dari Pengertian Konstitusi, Penyimpangan Konstitusi, amandemen uud 1945 sampai dengan uud 1945 amandemen terbaru.

1. Pengertian Konstitusi

Dalam arti sempit Konstitusi merupakan hukum dasar yang terdiri dari aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara Indonesia.

Sedangkan Dalam arti luas Konstitusi merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan untuk mengatur suatu kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan yang ada di negara dan tata hubungan secara timbal balik antar lembaga negara dengan warga negara.

2. Macam-Macam Konstitusi

Macam-macam konstitusi terbagi menjadi :

- Konstitusi tertulis yang biasa disebut dengan Undang-undang dasar
- dan Konstitusi tidak tertulis yang biasa disebut dengan konvensi.

3. Sifat dari Konstitusi

Konstitusi memiliki sifat berdasarkan jumlah pasalnya seperti berikut ini.

- Konstitusi memiliki sifat Fleksibel atau luwes
Artinya, pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi jumlahnya sedikit sehingga mudah untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- Konstitusi memiliki sifat Rigid atau kaku
Artinya, pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi jumlahnya banyak dan sulit sekali untuk diubah-ubah.

4. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Adapun Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah seperti berikut ini.

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 atau bisa disebut dengan UUD Proklamasi, berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. dan Pada saat diterapkannya UUD, sistematika UUD 1945 terdiri dari:

- > Pembukaan yang memiliki 4 alinea.
- > Batang tubuh yang Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 ayat aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan.
- > Penjelasan terdiri dari Penjelasan umum dan Penjelasan Khusus yang terdiri dari pasal demi pasal

Negara Indonesia Berbentuk negara kesatuan, berdasarkan dari Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 dan Bentuk pemerintahan dari negara Indonesia adalah republik, yang diatur berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. serta Sistem

pemerintahannya adalah kabinet presidensial yang artinya Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan negara. dan Dalam menjalankan tugas-tugasnya, presiden dibantu oleh para wakil presiden dan para menteri.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Tahukah kamu bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 atau dikenal dengan UUD RIS 1949 berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 dan Sistematika UUD RIS 1949 terdiri dari berikut ini.

- > Mukadimah yang Terdiri dari 4 alinea.
- > Batang tubuh, yang Terdiri dari: 6 bab, dan 197 pasal.

Serta bentuk dari negara Indonesia adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintah Indonesia ini adalah republik, yang telah diatur berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan dari negara Indonesia adalah kabinet parlementer yang dimana Presiden sebagai kepala negara dan perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

Sistematika UUDS 1950 terdiri dari berikut ini:

- > Mukadimah yang Terdiri dari 4 alinea.
- > Bab I : yaitu Negara Republik Indonesia
- > Bab II: yaitu tentang kelengkapan Alat-alat Negara
- > Bab III : yaitu tentang Tugas dari alat-alat kelengkapan negara
- > Bab IV : yaitu tentang Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja
- > Bab V : yaitu tentang Konstituante
- > Bab VI : yaitu tentang Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup

Serta Bentuk dari negara Indonesia adalah kesatuan, yang telah diatur berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUDS 1950 dan juga Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik, berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan mukadimah alinea IV UUDS 1950

Sistem pemerintahan era Undang Undang Dasar Sementara 1950 adalah kabinet parlementer dengan demokrasiya liberal yang masih bersifat semu atau sementara. Berdasarkan dengan sistem ini, DPR bisa membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki hak kedudukan yang kuat dan juga dapat membubarkan DPR.

d. Dekrit presiden 5 juli 1959

UUD 1945 hasil Dekrit Presiden disebut dengan UUD 1945 periode kedua, yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959. Gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan suatu rancangan Undang-Undang Dasar berdampak dengan keadaan politik yang tidak stabil sehingga mengakibatkan Presiden mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 juli 1959.

Adapun Salah satu isi dekrit tersebut yaitu memberlakukan kembali UUD 1945 dan Ketentuan mengenai bentuk negara, pemerintahan, serta pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan sama seperti yang tercantum di dalam UUD 1945.

e. UUD 1945 hasil amandemen

UUD 1945 hasil amandemen berlaku dari tahun 2000 sampai dengan Sekarang. Sehingga Sistematisasi UUD 1945 akan menjadi seperti ini:

- 1) Pembukaan Memiliki 4 alinea.
- 2) Batang tubuh yang Terdiri dari: 37 pasal, dan 16 bab.

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia, yaitu antara lain:

- 1) Dimana Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara Presiden dan DPR.
- 2) Lalu Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, maksimal 2 kali masa jabatan
- 3) Serta Dilaksanakannya otonomi daerah.
- 4) dan Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non pemerintahan yang netral dan mandiri.

5. Penyimpangan terhadap Konstitusi

Berikut beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap konstitusi yang pernah terjadi di indonesia.

a. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1945-1949

Kekuasaan presiden tidak terbatas. Tahukah kamu? Pada Masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa itu, kekuasaan presiden sangatlah luas. Selain bisa menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga dapat menjalankan kekuasaan MPR dan DPR.

Disamping presiden, hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer yang menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab atas parlemen/DPR.

- b. Penyimpangan terhadap UUD RIS 1949
Penyimpangan bentuk negara serikat yang bertentangan dengan konsep Negara Indonesia dimana Pergantian UUD 1945 menjadi UUD RIS. serta Pemerintahan parlementer yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.
- c. Penyimpangan terhadap UUDS 1950
 - > Persaingan tidak sehat => yaitu Dengan diterapkannya demokrasi liberal, dan ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu serta partai politik sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - > Instabilitas nasional => yaitu terjadinya instabilitas nasional yang sering mengakibatkan berganti-gantinya kabinet sehingga menimbulkan program-program yang disusun sebelumnya tidak berjalan sesuai rencana.
- d. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1959-1965 (Orde Lama)
Presiden membubarkan DPR dikarenakan tidak menyetujui RAPBN yang disusulkan pemerintah. Sehingga Penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. dan terdapat penyimpangan lain dimana Pengangkatan presiden menjadi seumur hidup yang diatur melalui Tap MPR No.III/ MPRS/1963 dan juga terdapat penyimpangan Rangkap jabatan Seperti Pimpinan lembaga tertinggi di negara diangkat menjadi menteri negara. dan Kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dimana Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.serta Tidak berjalannya hak bujet DPR dikarenakan pemerintah sudah tidak lagi mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
- e. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965 (Orde Baru)
Berikut beberapa penyimpangan terjadi terhadap UUD 1945 periode 1965, yaitu pada masa orde baru sampai munculnya Gerakan Reformasi pada tahun 1998.
 - > Sistem demokrasi yang berjalan bersifat feodalisme.
 - > Membatasi aspirasi dimana Kebebasan berbicara terutama untuk yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah malah dibungkam
 - > Ekonomi kerakyatan tidak berjalan karena berubah menjadi ekonomi kapitalisme, monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga.
 - > Supremasi hukum tidak berjalan sehingga membuat Supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden.
 - > Lembaga legislatif tidak berjalan mewakili rakyat bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik
 - > Bermunculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

6. Amandemen UUD 1945

Amandemen merupakan penambahan ataupun perubahan pada sebuah konstitusi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah aslinya.

a. Persetujuan dasar dalam mengamandemen UUD 1945

- 1) Pertama tidak boleh mengubah Pembukaan UUD 1945.
- 2) Lalu harus selalu menetapkan atau mempertahankan bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) dan Tetap mempertahankan sistem presidensial.
- 4) serta Penjelasan UUD 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang ada.
- 5) dan yang paling penting Perubahan harus dilakukan secara "adendum".

b. Tujuan dari amandemen UUD 1945

- 1) Memenuhi semua tuntutan-tuntutan reformasi
- 2) Untuk merevisi ulang UUD 1945
- 3) Agar setiap isi UUD 1945 lebih jelas setelah amandemen

c. Perbaikan dan perubahan yang diminta pada amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan pembatasan-pembatasan atas kekuasaan Presiden di Indonesia.
- 2) Harus Memperkuat dan menegaskan kembali peran terhadap kekuasaan legislatif di Indonesia.
- 3) Mencantumkan dan memberikan Hak Asasi Manusia Indonesia.
- 4) Menegaskan kembali hak dan kewajiban negara indonesia ataupun warga negaranya.
- 5) Otonomi daerah dan hak-hak rakyat yang ada di daerah.
- 6) Pembaruan lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

d. Tahap-tahap pada amandemen UUD 1945

Kapan sih amandemen UUD 1945 terjadi? Berapa kali amandemen uud 1945 dan perubahan apa saja yang sebelum dan sesudah amandemen? dibawah ini akan aku jelaskan apa saja yang diubah pada saat amandemen uud 1945 beserta tahap-tahapannya.

1) Tahapan pertama

Sidang Umum MPR 1999 terjadi pada tanggal 14-21 Oktober 1999 yang merupakan perubahan pertama UUD 1945 Menyangkut 5 persoalan Pokok.yaitu

- Perubahan terhadap lembaga pemegang kekuasaan membuat yang undang-undang.
 - Perubahan terhadap masa jabatan presiden.
 - Perubahan terhadap hak prerogatif presiden.
 - Perubahan terhadap fungsi menteri.
 - Perubahan terhadap redaksional
- Adapun di sidang kali ini ada 9 pasal yang diamandemen antara lain: Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.

2) Tahapan Kedua

Tanggal 7-18 Agustus 2000 merupakan perubahan kedua UUD 1945 sidang tahunan MPR tahun 2001 di dalamnya Menyangkut 9 persoalan peraturan mengenai:

- Wilayah negara indonesia.
- Hak-hak asasi manusia yang ada di indonesia.
- DPR.
- Pemerintahan Daerah.
- Pertahanan dan keamanan.
- Lambang negara Indonesia.
- Serta Lagu kebangsaan.

Adapun di sidang kedua terdapat 5 bab dan 25 pasal yang diamandemen antara lain : Bab IXA, X, XA, XII, dan XV. sedangkan untuk pasal yang diamandemen yaitu Pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36B, 36C, dan 36A.

3) Tahap ketiga

Sidang ketiga amandemen UUD 1945 terjadi pada Tanggal 1 sampai 9 November 2001 membahas beberapa persoalan pokok, antara lain:

- Kedaulatan rakyat.
- Tugas MPR.
- Syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden.
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
- Pemberhentian Presiden
- Kekosongan Wakil Presiden.
- Perjanjian internasional

- Kementerian negara
- Pemilihan umum.
- APBN, pajak, dan keuangan negara,
- Komisi Yudisial.
- Mahkamah Konstitusi.

Adapun di sidang ketiga kali ini terdapat 3 bab dan 22 pasal yang diamandemen yaitu: Bab VIIA, VIIB, dan VIIIA. Serta Pasal 1, 3, 6, 6A, 7A 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan 24C

4) Tahap keempat

Sidang keempat amandemen UUD 1945 terjadi pada tanggal 1-11 Agustus 2002 membahas beberapa persoalan sebagai berikut.

- Komposisi keanggotaan MPR.
- Pemilu Presiden dan wakil Presiden.
- Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan
- Dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat Presiden.
- Mata uang.
- Bank central.
- Badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman.
- Pendidikan.
- Kebudayaan.

Adapun di sidang kali ini yang diamandemenkan 2 bab dan 13 pasal yang diamandemen antara lain: Bab XIII, dan XIV. Serta Pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan 37.

Jadi bisa disimpulkan terdapat 4 kali amandemen UUD 1945 yang terjadi, yaitu :

- Sebanyak 25 butir tidak diubah,
- 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya.
- Secara keseluruhan, saat ini berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru.

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di bumi belahan bagian timur di Benua Asia tepatnya Asia bagian tenggara. Indonesia diapit oleh dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera hindia dengan iklim tropis serta letak astronomis 6° lintang utara – 11° lintang selatan dan 95° bujur timur – 141° bujur timur.

Indonesia juga dilewati oleh dua pegunungan muda dunia yakni di sebelah barat dengan Mediterania serta sebelah timur dengan Pegunungan Sirkum Pasifik. Mempunyai tiga zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Serta tercatat sebagai Negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dengan total luas wilayahnya sebesar 1.904.569 KM².

Selain itu, Indonesia juga memiliki identitas resmi sebagai suatu negara, diantaranya :

1. Indonesia Raya sebagai Lagu kebangsaan.
2. Bendera Merah Putih sebagai Bendera Kebangsaan.
3. Burung Garuda sebagai simbol Kebangsaan.
4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Kebangsaan.
5. Terbentuknya NKRI

- a. Pembentukan dan Perkembangan Awal NKRI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut:

Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan-persiapan di rumah Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih kurang 1000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting itu. Pada pukul 10 kurang lima menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan, dan acara segera dimulai tepat pada jam 10 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Soekarno

membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Moh. Hatta.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting berikut:

- Mengesahkan UUD yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Cosakai (yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945)
- Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
- Dalam masa Peralihan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk "Komite Nasional Indonesia Pusat" (KNIP).

KNIP akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan wakil Presiden membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 1945 dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah RI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi-provinsi itu adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).

b. Tujuan NKRI

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Sehingga tersirat tujuan negara yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum,
- Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

6. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945

- Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan menyatakan bahwa Pasal 1 ayat 1 tidak dapat diubah.
- Pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5).
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Pasal ini merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan.
- Pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang."
- Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah.
- Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/ PRP/1960 tentang Perairan Indonesia

7. Pengertian Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik".

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sila ke-3 Pancasila, "Persatuan Indonesia";
- b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... persatuan Indonesia ...";
- c. Serta Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik".

Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah disebutkan, selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia juga mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten, kota dan provinsi. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria.

Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyatakan bahwa ada tujuh prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut:

- Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- Prinsip kekhususan dan keragaman daerah.
- Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
- Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.
- Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas luasnya akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

8. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

- a. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan

Portugis antara lain: perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII.

Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin dan Maluku dipimpin oleh Pattimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.

D. Bhinneka Tunggal Ika

1. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

Istilah Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada zaman Majapahit di era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan dari semboyan Bhineka Tunggal Ika dilakukan oleh Mpu Tantular di dalam kitab Sutasoma. Pada dasarnya, semboyan tersebut merupakan pernyataan kreatif dalam usaha untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan juga keagamaan. Hal itu juga dilakukan karena sehubungan dengan usaha bina Negara kerajaan Majapahit pada waktu itu. Di dalam kitab Sutasoma sendiri, Bhineka Tunggal Ika lebih ditekankan untuk perbedaan dalam hal kepercayaan serta keaneragaman agama yang ada di kalangan rakyat Majapahit.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika, memberikan nilai yang inspiratif di dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan. Semboyan tersebut juga mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam NKRI. Namun sebagai semboyan NKRI, konsep yang ada di dalam Bhineka Tunggal Ika tak hanya menyangkut perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus utama. Namun dijadikan semboyan dalam artian yang lebih luas yaitu seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat-istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan juga kepercayaan untuk menuju persatuan dan kesatuan Negara.

Berbicara tentang lambang dari negara Indonesia, Lambang yang tergambar Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada carknya ditetapkan secara resmi menjadi salah satu bagian NKRI. Yaitu melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 serta telah diundang – undangkan di tanggal 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara.

2. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

a. Common Denominator

Di dalam negara Indonesia, kita telah mengetahui bahwa ada 5 macam agama di dalamnya, namun hal tersebut sampai saat ini tak lantas menjadi celan agama satu dengan lainnya.

Karena sesuai dengan prinsip semboyan yang pertama, perbedaan di dalam agama tersebut harus kita cari common denominatornya atau dengan kata lain mencari persamaan di dalam perbedaan tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keanekaragaman dan juga kedamaian dengan terdapatnya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Begitu juga pada aspek yang lain, sehingga segala macam perbedaan tersebut tetap bersatu di dalam bingkai NKRI.

b. Tidak Bersifat Sektarian dan Enklusif

Maksud dari prinsip yang kedua yakni bahwasannya seluruh warga negara Indonesia tidak dibenarkan menganggap dirinya atau kelompoknya merupakan orang yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui. Pandangan sektarian dan eksklusif harus dihapuskan dari bangsa ini karena akan menimbulkan banyak konflik yang disebabkan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebihan serta egois dan tidak mau memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain.

Dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki sifat inklusif yang berarti kebersamaan, jadi semua kelompok yang ada harus saling memupuk rasa persaudaraan dan tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Serta kelompok mayoritas tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya.

c. Tidak Bersifat Formalistis

Dalam artian, semboyan negara kita tidak hanya menunjukkan sikap yang kaku dan semu, tetapi justru menunjukkan sifat yang menyeluruh atau universal. Dilandasi dengan rasa kasih-sayang, hormat, percaya, serta rukun antar sesama. Sebab, dengan cara tersebutlah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai ke-Indonesiaan yang damai.

d. Bersifat Konvergen

Bersifat konvergen yang berarti bila negara telah dilanda masalah mengenai keragaman bukan untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal tersebut dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non sectarian, serta inklusif

3. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika

a. Perilaku Inklusif

Seseorang harus dapat menganggap bahwa dirinya masuk ke dalam suatu populasi yang luas, sehingga sifat sombong atau melihat dirinya melebihi dari yang lain tidak muncul. Berlaku juga di suatu kelompok. Kepentingan bersama harus selalu diutamakan daripada hanya untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibanding kelompok lainnya. Dengan tercapainya mufakat, semua elemen di dalamnya akan merasa puas dan senang. Karena setiap kelompok yang berbeda mempunyai perannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Mengakomodasi Sifat Pluralistik

Dilihat dari keberadaan keragaman yang ada di dalamnya, Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat Pluralistik terbesar yang ada di dunia. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia disegani oleh bangsa lain yang ada di dunia, namun jika hal ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada disintegrasi di dalam bangsa. Suku bangsa, bahasa, adat, agama, ras serta budaya di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak. Sikap toleran, kasih sayang, saling menghormati, menjadi kebutuhan wajib untuk segenap rakyat Indonesia agar terciptanya masyarakat yang tentram dan damai.

c. Tidak Mencari Menangnya Sendiri

Perbedaan pendapat memang hal yang lumrah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang dimana menuntut rakyatnya untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling hormat antar sesama merupakan hal yang sangat penting.

Dari sifat Bhinneka Tunggal Ika yang konvergen haruslah benar-benar nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jauhkan sifat divergen untuk kepentingan bersama.

d. Musyawarah untuk Mufakat

Pentingnya mencapai mufakat dalam musyawarah memang menjadi kunci kerukunan hidup di negara Indonesia. Segala perbedaan dicari solusi tengahnya untuk mencari inti kesamaan sehingga segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan.

e. Dilandasi Rasa Kasih Sayang dan Rela Berkorban

Sesuai dengan pedoman yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya, rasa rela berkorban haruslah ada dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa itulah yang akan terbentuk dengan dilandainya rasa saling kasih mengasihi, dan juga sayang menyayangi. Menjauhi rasa benci sebab hanya akan memicu konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa (disintegrasi). Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar-kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara.

Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena setiap orang hanya akan hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.

5. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya

a. Perilaku Toleran dalam Kehidupan Beragama

Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- > Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar.
- > Menghormati agama yang diyakini orang lain.
- > Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain.
- > Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.

b. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah dan bentuk tubuh melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut.

Berikut contoh perilaku toleran terhadap keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

- > Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain
- > Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik.
- > Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya.
- > Lebih mengutamakan Negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing

c. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan :

- > Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia;

- > Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya;
- > Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri;
- > Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia

BAHASA INDONESIA

Tes pemahaman bacaan merupakan salah satu bentuk tes yang pengerjaannya berdasarkan atau berkait dengan bacaan atau teks yang disajikan. Tes jenis ini sering disebut juga dengan tes bahasa Indonesia. Melalui tes ini, kemampuan dan pengetahuan seseorang terkait ketatabahasa dan pemahaman terhadap bacaan dapat dilihat.

A. Gagasan Utama Bacaan

Gagasan utama / gagasan pokok / ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang bacaan. Cara menemukannya adalah sebagai berikut:

1. membaca secara cermat.
2. memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan.
3. menemukan ide pokok tiap paragraf kemudian digabungkan dan dirangkum sehingga didapatkan kesimpulan hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan tersebut.

B. Paragraf

Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berhubungan dan membentuk satu gagasan. Biasanya dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang padu, dan kalimat pertama dalam suatu paragraf ditulis dengan cara agak menjorok ke dalam.

Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama:

1. Paragraf deduktif Gagasan utama terletak pada awal paragraf.
2. Paragraf induktif Gagasan utama terletak pada akhir paragraf.
3. Paragraf campuran Gagasan utama terletak pada awal dan akhir paragraf.

C. Gagasan Utama Paragraf

Gagasan utama / gagasan pokok / ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf sehingga dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama.

D. Kalimat Utama

Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. Dalam satu paragraf, terdapat gagasan pokok atau utama yang berada pada kalimat utama. Kalimat utama dikembangkan oleh kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama sering disebut kalimat topik sehingga perlu dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya dalam paragraf tersebut yang disebut sebagai kalimat penjelas.

Ciri-ciri kalimat utama:

1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut.
2. Berupa kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri.
3. Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain.
4. Pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai dengan kata-kata seperti: "Sebagai kesimpulan "Yang penting : "Jadi, "Dengan demikian..."

E. Kalimat Penjelas

Kalimat penjelas, yaitu kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama.

Ciri-ciri kalimat penjelas:

1. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri.
2. Arti kalimatnya akan lebih jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf.
3. Pembentukannya memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi.
4. Berisi rincian, keterangan, contoh dan data yang mendukung kalimat utama.

F. Kalimat Efektif

Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis.

Ciri-ciri Kalimat Efektif:

1. Kesepadanan struktur
Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri kesepadanan adalah sebagai berikut :
 - a. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas.
Rumus:
Subjek = apa/siapa + predikat

Contoh:

Hanan bermain bola ke lapangan.

Siapa bermain bola ke lapangan?

Jawabannya : Hanan, artinya Hanan sebagai subjek

Rumus:

Predikat = sedang apa/bagaimana diapakan/ bagaimana mengapa + subjek.

Contoh:

Kemarin rumah itu terbakar.

Mengapa rumah itu?

Jawabannya: terbakar, artinya terbakar sebagai predikat.

- b. Tidak terdapat subjek yang ganda.

Contoh:

Mama memasak sehingga mama tidak ke kantor (Tidak efektif).

Mama memasak sehingga tidak ke kantor (efektif).

- c. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata "yang".

Contoh:

Dia yang pergi ke pasar (tidak efektif)

Dia pergi ke pasar (efektif)

- d. Jangan menaruh preposisi di awal kalimat.

Contoh:

Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu(tidak efektif)

Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu (efektif)

2. Keparalelan Bentuk

Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat

Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Begitu pun dengan verba.

Contoh:

Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. (Tidak paralel)

Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pekerjaannya. (Paralel)

3. Ketegasan makna

Ketegasan makna adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat.

Contoh:

Kau sapulah lantai kantor agar bersih! (tidak efektif)

Sapulah lantai kantormu agar bersih! (efektif)

4. Kehematan kata

Kehematan kata adalah tidak mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu.

Contoh:

Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. (tidak efektif)

Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. (efektif)

Syarat-syarat Kalimat Efektif

1. Sesuai PUEBI

Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya.

2. Sistematis

Kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian dengan objek, pelengkap, hingga keterangan.

3. Tidak Boros dan Bertele-tele

Jangan sampai kalimat yang terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan.

4. Tidak Ambigu

Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan; pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu.

G. Tanda Baca

TANDA ELIPSIS

1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan.

Contoh:

Penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut.

Catatan:

Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi.

Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik (jumlah titik empat buah).

2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog.

Contoh:

"Menurut saya ... seperti ... bagaimana, Bu?"

Catatan:

Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi.

Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik (jumlah titik empat buah).

TANDA PETIK

1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain.

Contoh:

"Merdeka atau mati!" seru Bung Tomo dalam pidatonya.

2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat.

Contoh:

Sajak "Pahlawanku" terdapat pada halaman 125 buku itu.

3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.

Contoh:

"Tetikus" komputer ini sudah tidak berfungsi.

TANDA PETIK TUNGGAL

1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain.

Contoh:

Tanya dia, "Kau dengar bunyi 'kring-kring' tadi?"

2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan.

Contoh:

tergugat 'yang digugat'

TANDA KURUNG

1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.

Contoh:

Dia memperpanjang surat izin mengemudi (SIM).

2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.

Contoh:

Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962.

3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan.

Contoh:

Dia berangkat ke kantor selalu menaiki (bus) Transjakarta.

4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian.

Contoh:

Faktor produksi menyangkut (a) bahan baku, (b) biaya produksi, dan (c) tenaga kerja.

TANDA KURUNG SIKU

1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain.

Contoh:

Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik.

2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung.

Contoh:

Persamaan kedua proses itu (perbedaannya dibicarakan di dalam Bab II [lihat halaman 55-69]) perlu dibentangkan di sini.

TANDA GARIS MIRING

1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim.

Contoh:

Nomor: 7/PK/II/2013

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap.

Contoh:

dikirimkan lewat darat/laut = 'dikirimkan lewat darat atau lewat laut'

3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain.

Contoh:

Buku Pengantar Ling/g/uistik karya Verhaar dicetak beberapa kali.

TANDA KOMA

1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.

Contoh:

Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi.

2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk setara).

Contoh:

Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup.

3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.

Contoh:

Kalau diundang, saya akan datang.

Catatan:

Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat.

Contoh :

Saya akan datang kalau diundang.

4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian.

Contoh:

Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri.

5. Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik atau Nak.

Contoh:

O, begitu?

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat.

Contoh:

Kata nenek saya, "Kita harus berbagi dalam hidup ini."

Catatan :

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah. atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya.

Contoh : "Di mana Saudara tinggal?" tanya Pak Lurah.

7. Tanda koma dipakai diantara (a) nama dan alamat, (b) bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

Contoh:

Sdr. Abdullah, Jalan Kayu III/18, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130

8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka.

Contoh :

Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Restu Agung.

9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir.

Contoh:

Sutan Takdir Alisjahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 25.

10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

Contoh:

B. Ratulangi, S.E.

11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka.

Contoh:

12,5 m. Rp500,50.

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi.

Contoh:

Di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah.

Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma!

Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes.

13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian.

Contoh:

Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah.

Bandingkan dengan:

Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah.

TANDA HUBUNG (-)

1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris.

Contoh:

Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan i-

kan dan rumput laut.

2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang.

Contoh:

Cita-cita

3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu.

Contoh:

11-11-2013, s-e-m-a-n-g-a-t

4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.

Contoh:

ber-evolusi

5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai:

- se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital (se-Indonesia, se-Jawa Barat);
- ke- dengan angka (peringkat ke-2).
- angka dengan -an (tahun 1950-an).
- kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital (hari-H, sinar-X, ber-KTP, di-SK-kan).
- kata dengan kata ganti Tuhan (ciptaan-Nya, atas rahmat-Mu).

- f. huruf dan angka (D-3, S-1, S-2); dan g. kata ganti -ku, -mu, dan -nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital (KTPmu, SIM-nya, STNK-ku).

Catatan:

Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf.

Contoh:

P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan).

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing.

Contoh:

di-sowan-i (bahasa Jawa, 'didatangi').

7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan.

Contoh:

Kata pasca- berasal dari bahasa Sanskerta.

TANDA TANYA (?)

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya.

Contoh:

Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati?

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.

Contoh:

Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 (?)

TANDA SERU (!)

1. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.

Contoh:

Alangkah indahnya taman laut di Wakatobi!

H. Pemakaian Huruf

HURUF KAPITAL

1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat.

Contoh:

- a. Kita harus bekerja keras.
- b. Pekerjaan itu akan selesai dalam satu jam.
2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan.
Contoh:
 - a. Amir Hamzah
 - b. Halim Perdana Kusumah
 Catatan :
 - a. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran.
Contoh:
ikan mujair, mesin diesel
 - b. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna 'anak dari', seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas.
Contoh:
Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim
3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung
Contoh:
Adik bertanya, "Kapan kita pulang?"
4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan.
Contoh:
Islam, Alquran
5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang.
Contoh:
Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin
6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan.
Contoh:
Selamat datang, Yang Mulia. Semoga berbahagia, Sultan.
6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.
Contoh:
Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.
Contoh:
bangsa Indonesia
Catatan:
Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital.
Contoh:
keinggris-inggrisan
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya.
Contoh:
tahun Hijriah
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah.
Contoh:
Konferensi Asia Afrika
10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.
Contoh:
Jakarta
11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.
Contoh:
Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal.
Contoh:
Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma.
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan.
Contoh:
S.H. = sarjana hukum
14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan.

Contoh:

"Silakan duduk, Dik!" kata orang itu.

HURUF MIRING

1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka.

Contoh:

Saya sudah membaca buku *Salah Asuhan* karangan Abdoel Moeis.

2. Huruf miring dipakai untuk mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh: Huruf terakhir kata *abad* adalah *d*.
3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.

Contoh:

Upacara *peusijek* (tepung tawar) menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh.

Catatan:

- a. Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring.
- b. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan komputer), bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah.
- c. Kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.

PREDIKSI LATIHAN TRYOUT TKD WAWASAN KEBANGSAAN BUMN

1. Ketika di sekolah, Budi melihat ada temannya yang terlambat menghormat Bendera Merah Putih pada upacara bendera. Budi memutuskan untuk mengingatkan temannya dan menjelaskan pentingnya menghormati simbol-simbol nasional. Tindakan Budi mencerminkan sikap...
 - A. Patriotisme
 - B. Toleransi
 - C. Kemandirian
 - D. Ketenagakerjaan
 - E. Nasionalisme
2. Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan
 - A. Komunisme
 - B. Liberalisme
 - C. Etnosentrisme
 - D. Imperialisme
 - E. Chauvinisme
3. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, yang disebut
 - A. Demokrasi formal
 - B. Demokrasi material
 - C. Demokrasi fiskal
 - D. Demokrasi perwakilan
 - E. Demokrasi gabungan
4. Nasionalisme merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu negara dalam
 - A. Mempertahankan keutuhannya
 - B. Merebut kemerdekaan
 - C. Mewujudkan cita-citanya
 - D. Membentuk demokrasi yang sehat
 - E. Membangun ekonomi bangsa
5. Nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarkis yang tercipta akibat kebijakan dan politik Etis Belanda yang menempatkan bumi putera pada golongan kelas, yaitu
 - A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
 - E. Kelima

6. Artidjo Alkostar adalah tokoh Indonesia selanjutnya yang dikenal dengan integritas tinggi. Ia merupakan pengacara dan hakim agung Indonesia periode 2000 hingga 2018. Sepanjang kariernya, Artidjo memiliki julukan 'Algojo Koruptor' karena dirinya tak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan, banyak pihak yang menyebut bahwa ia adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satunya kepada Angelina Sondakh dalam kasus korupsi wisma atlet. Semula, Angelina divonis 4 tahun penjara. Namun, Artidjo menambahnya menjadi 12 tahun penjara. Nilai sikap integritas yang dapat dicontoh dan diambil dari sosok Artidjo Alkostar adalah

- A. Jujur, tegas, dan adil
- B. Jujur, berani, dan adil
- C. Jujur, berani, dan tegas
- D. Bertanggung jawab, jujur, dan kesatria
- E. Jujur, konsisten, dan tegas

7. Ditengah banyaknya pegawai negeri sipil, Alan adalah salah satu pegawai yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, namun kenyataannya Alan harus dihadapi dengan rekan sekerja yang secara sadar melakukan tindakan tidak etis dan melanggar norma-norma yang berlaku. Apa yang harus Alan lakukan untuk tetap menjaga integritasnya dalam situasi tekanan tersebut?

- A. Mengikuti tekanan
- B. Menjalani tindakan tidak etis
- C. Menolak tindakan tidak etis
- D. Meningkatkan tekanan

E. Melakukan tindakan etis setengah-setengah

8. Seorang pencuri yang tertangkap basah dalam aksinya membobol habis sebuah bank langsung diamankan polri. Aparat kepolisian tersebut langsung memberikan hukuman mati supaya pencuri merasa jera. Hal ini sangat bertolak belakang dengan..

- A. Kedudukan polri di bawah mandat jenderal
- B. Kelompok polri yang mal aksi
- C. Kedudukan polri ada di bawah departemen pertahanan
- D. Tidak adanya laporan yang jelas terhadap kepala negara
- E. Memberikan hukuman sesuai dengan kehendak pribadi

9. Raya sedang menghadapi dilema ketika di sekolahnya akan diadakan demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan siswa terkait fasilitas sekolah yang kurang memadai. Raya sangat ingin ikut serta dalam demonstrasi tersebut, tetapi ia juga takut akan konsekuensi yang akan ia hadapi di sekolah. Apa yang sebaiknya Raya lakukan untuk tetap menunjukkan fungsi integritas?

- A. Menyuarakan tuntutan siswa dengan berpartisipasi dalam demonstrasi, meskipun ada risiko konsekuensi di sekolah.
- B. Tidak berpartisipasi dalam demonstrasi untuk menghindari konsekuensi yang mungkin muncul.
- C. Berbicara dengan kepala sekolah dan mencoba mencari solusi tanpa harus berpartisipasi dalam demonstrasi.

- D. Melaporkan tuntutan siswa kepada media tanpa terlibat langsung dalam demonstrasi.
- E. Mencari cara untuk memengaruhi kebijakan sekolah tanpa harus berpartisipasi dalam demonstrasi.
10. Seorang guru meminta setiap muridnya untuk menjaga tanaman yang diberikan selama 2 minggu di rumah masing-masing, dan melaporkan perkembangan setiap harinya. Hal ini merupakan implementasi dari penerapan...
- Tugas
 - Kebebasan
 - Prestasi
 - Tanggung jawab
 - Kewajiban
11. Tujuan Nasional, Kebijakan Terpadu, Doktrin dan Strategi, serta Konstelasi Geografis dan Demografis Indonesia merupakan ... Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Unsur
 - Landasan
 - Ciri-ciri
 - Isi
 - Wadah
12. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai ...
- negara kepulauan
 - negara berkembang
 - negara maritim
 - negara pluralis
 - negara berideologi Pancasila
13. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna ...
- Wawasan Nusantara
 - Wawasan Kebangsaan
 - Paradigma Nusantara
 - Pertahanan dan Keamanan Indonesia
 - Bela Negara
14. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu ... ketahanan nasional.
- prinsip
 - fungsi
 - asas
 - ideologi
 - cita-cita
15. Ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara, melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat diatur dalam ..
- UU No. 3 Tahun 2002

- B. UU No. 2 Tahun 2002
- C. TAP MPR No. IV/MPR/1999
- D. UU No. 39 Tahun 1999
- E. TAP MPR No. XI/MPR/1999

16. Persamaan kedudukan warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia turut tercipta dalam lingkungan masyarakat yang dapat dicontohkan dengan...

- A. Mau mengikuti program transmigrasi
- B. Membayar pajak tepat waktu
- C. Bekerjasama dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat
- D. Saling membantu meringankan warga negara
- E. Saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah

17. Desi sedang membantu adiknya, Rani, belajar tentang sejarah Indonesia. Saat membahas tentang Pancasila, Rani bertanya, "Kak, Pancasila itu artinya apa sih?". Desi menjawab dengan analogi, "Bayangkan kamu punya keranjang buah. Di dalamnya ada lima jenis buah yang berbeda, tapi semuanya menjadi satu dalam keranjang tersebut. Masing-masing buah mewakili prinsip atau pedoman yang berbeda, namun semuanya bersatu menjadi satu dalam keranjang buah itu."

Berdasarkan analogi yang diberikan Desi, arti harfiah dari Pancasila adalah ...

- A. Lima pedoman kebangsaan
- B. Dasar yang memiliki lima unsur
- C. Lima komponen penting
- D. Lima unsur hidup manusia

E. Falsafah yang memiliki lima pedoman bernegara

18. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu....

- A. Sila kesatu
- B. Sila kedua
- C. Sila ketiga
- D. Sila keempat
- E. Sila kelima

19. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan dan bahasa persatuan, walaupun pada kenyataannya banyak yang lebih banyak menggunakan bahasa daerah, akan tetapi bahasa Indonesia juga sama pentingnya dan bahkan kedudukannya harus berada di atas bahasa daerah sesuai dengan ikrar ketiga pada Sumpah Pemuda, yaitu "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Selain sebagai bahasa persatuan, fungsi dari bahasa Indonesia antara lain...

- A. Sebagai bahasa negara
- B. Sebagai bahasa sehari-hari
- C. Sebagai penghubung antar daerah
- D. Sebagai bahasa yang dibanggakan
- E. Sebagai bahasa utama

20. Di sebuah desa, terdapat dua kelompok warga yang sering kali berselisih paham dan terjadi konflik antara mereka. Salah satu kelompok, Kelompok A, merasa memiliki hak lebih dan ingin mendominasi desa. Sementara itu,

Kelompok B merasa tidak adil dan ingin mendapatkan keadilan yang sama. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila?

- A. "Kelompok A harus mendominasi desa karena kepentingan mereka lebih besar."
- B. "Kelompok B harus menerima ketidakadilan yang ada dan menghindari konflik."
- C. "Kedua kelompok harus berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati prinsip keadilan Pancasila."
- D. "Pemerintah harus campur tangan dan memaksakan solusi yang dianggap terbaik."
- E. "Kedua kelompok harus melupakan perbedaan mereka dan tidak menghadirkan masalah dalam masyarakat."

21. Pemakaian tanda koma (,) yang salah terdapat dalam kalimat ...

- A. Harga cabai yang makin gila, disertai dengan kenaikan harga beras di tengah keributan para elite bangsa ini mengenai impor beras, merupakan cermin bagaimana pemerintah kurang melindungi masyarakat.
- B. Perubahan politik di Jerman Timur yang ditandai dengan menurunnya kekuasaan komunis, mencapai klimaks pada pembukaan tembok Berlin.
- C. Namun, terlepas dari pro dan kontra yang mengemuka, forum itu menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di segala aspek tidak

boleh surut, siapa pun pelakunya.

- D. Di atas meja, misalnya, dapat diamati himpunan benda-benda seperti jarum, pena, benang, kertas, garpu, buku tulis, tinta, paku, dan dapat diperbanyak lagi dengan benda-benda lain.
- E. Pasalnya, selama sepuluh tahun berkiprah di Indonesia, Rivaldo termasuk pemain sepak bola asing dengan prestasi paling bagus.

22. Wajib pajak juga memberi keterangan lisan dan/atau tertulis. Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah....

- A. Baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis diberikan oleh orang yang menyetor pajak.
- B. Baik keterangan lisan maupun keterangan tulisan diberikan oleh orang yang memungut pajak.
- C. Baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis atau salah satu dari keterangan tersebut diberikan oleh orang yang menyetor pajak.
- D. Keterangan lisan maupun keterangan tertulis diberikan oleh orang yang memungut pajak.
- E. Jika keterangan tertulis tidak dapat diberikan oleh orang yang menyetor pajak, keterangan lisan dapat diberikan oleh orang yang memungut pajak.

23. Sebanyak 250 tentara Jerman dikerahkan ke Negara bagian Becklenburg-Vorpommern untuk membersihkan bangkai-bangkai burung. Dalam operasi tersebut, para tentara juga membantu para pejabat militer di tingkat Negara bagian. Dengan menggunakan

pesawat-pesawat tempur Tornado, mereka mencari bangkai-bangkai burung sepanjang pesisir Baltik. Pengerahan militer ini dilakukan setelah media massa Jerman sehari-hari mengkritik kerja otoritas setempat lamban. Dalam operasi tersebut ditemukan bahwa jumlah burung yang mati karena terkena flu burung di wilayah tersebut meningkat menjadi 79 ekor. Salah satu kalimat dalam paragraf tersebut tidak mendukung pokok pikiran paragraf, yakni kalimat

- A. Pertama
- B. Kedua
- C. Ketiga
- D. Keempat
- E. Kelima

24. Kalimat berikut ini yang termasuk kalimat baku adalah ...

- A. Menurut Bayu bahwa dalam situasi percakapan itu bukan semata-mata menyampaikan tuturan, tetapi juga melakukan tindakan.
- B. Menurut Zulvan, dalam mengenali sikap seseorang diperlukan perhatian yang penuh dan tulus terhadap sikap dan tutur katanya.
- C. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khususnya halaman 49, menjelaskan santun berarti 'serba rapi'.
- D. Menurut Darman, dijelaskan bahwa dalam bermain drama diperlukan rutinitas latihan secara serius, tidak sekadar hafal naskah.
- E. Menurut Zahid, dalam bukunya yang berjudul Menggapai Sukses untuk prestasi yang tinggi memerlukan kerja keras dan cermat.

25. Tiga hari yang lalu penjahit itu menyampaikan bahwa bajunya sudah selesai. Anak kalimat pada kalimat di atas berfungsi sebagai ...

- A. Subjek
- B. Predikat
- C. Objek
- D. Keterangan
- E. Pelengkap

26. Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan yaitu Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia tersebut membawa pengaruh terhadap Indonesia,

khususnya untuk mencapai kemerdekaan. Pengaruh yang didapatkan Indonesia adalah ...

- A. Munculnya fasisme Jepang di negaranya.
- B. Jepang kalah dari sekutu sehingga Jepang mengalami kekalahan pada saat melawan sekutu sehingga memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.
- C. Penyerangan sekutu ke Indonesia.
- D. Belanda datang kembali untuk menduduki Indonesia lagi.
- E. Belanda mengajak Indonesia bergabung pada saat perang dunia II.

27. Kronologi Peristiwa Rengasdengklok bermula dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita terkait Jepang tersebut didengar oleh para Pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Mendengar peristiwa itu, para pemuda bergerak mendesak Soekarno-Hatta mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa paling terkenal dalam sejarah kronologi peristiwa Rengasdengklok ialah golongan pemuda berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta lalu membawa keduanya ke Rengasdengklok. Maksud para pemuda menculik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok adalah ...

- A. Membuat naskah proklamasi.
- B. Menyembunyikan keduanya karena sedang dikejar-kejar Jepang.

- C. Memaksa keduanya untuk menandatangani naskah proklamasi.
- D. Melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh golongan pemuda
- E. Menghindari pengaruh dan tekanan dari Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

28. Perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang harus diberantas jika ingin negara menjadi maju. Karena perilaku itu merugikan negara dan banyak orang. Namun saat ini bangsa Indonesia sepertinya hanya fokus kepada korupsi dibandingkan kolusi dan nepotisme. Sehingga dua istilah itu lebih jarang terdengar. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah tindak pidana, hanya saja kolusi apalagi nepotisme masih seringkali sulit dibuktikan. Padahal ancaman hukuman untuk nepotisme juga tidak main-main. Dimana Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dampak dari perilaku tersebut adalah kecuali ...

- A. Diskriminasi kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang.
- B. Meningkatnya motivasi kerja dan kinerja mereka yang masuk melalui jalur rekrutmen resmi.
- C. Muncul konflik loyalitas dalam organisasi
- D. Ketidakadilan terus menerus yang dirasakan orang lain yang

seharusnya berkesempatan mengembangkan karir.

- E. Timbulnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat.

29. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Menurut penanggalan Jepang, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di ...

- A. Rumah Laksamana Maeda
- B. Lapangan Ikada
- C. Rumah Bung Karno
- D. Lapangan Merdeka
- E. Bundaran HI

30. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Keduanya kemudian ditunjuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Berita pembacaan teks proklamasi disebarkan secara langsung oleh para utusan ke daerah-daerah. Makna pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah ...

- A. Rakyat Indonesia dapat mengambil alih seluruh persenjataan Jepang di Indonesia
- B. Jepang telah memenuhi janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia
- C. Indonesia segera menyusun pemerintahan dan ketatanegaraan yang baru

D. Waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

- E. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia

31. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Achmad Soebardjo melakukan perundingan. Achmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan Achmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Pada saat Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Tujuan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menghubungi Nishimura setelah kembali dari Rengasdengklok dalam kaitannya dengan Proklamasi Indonesia adalah....

- A. Rakyat mengajak kerja sama untuk melaksanakan proklamasi Indonesia
- B. Menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia

- C. Meminta agar Jepang tidak mengganggu pelaksanaan proklamasi Indonesia
- D. Memberikan penjelasan tentang tujuan proklamasi Indonesia
- E. Menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia

32. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat. Hal ini karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, dalam Pasal 7C menyatakan bahwa "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat". Hal ini karena ...

- A. Presiden diangkat oleh DPR
- B. DPR adalah wakil rakyat
- C. Presiden adalah Pimpinan Rakyat
- D. DPR adalah Amanat Rakyat
- E. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara

33. Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini yang termasuk golongan tua adalah kecuali ...

- A. Ahmad Soebardjo
- B. M.Yamin
- C. Sukarni

- D. Mas Mansyur
- E. Iwa Kusuma Sumantri

34. Wabah infeksi virus Corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit ke seluruh negara termasuk negara Indonesia. Virus corona yang setiap harinya selalu meningkat membuat kekhawatiran bagi semua kalangan masyarakat, kasus virus corona yang muncul data per juni 2020 sudah sekitar 31.186 orang, hal tersebut tentu dapat menimbulkan rasa takut dan panik. Apalagi anjuran untuk diam di rumah serta kebijakan sosial distancing, yang kini disebut physical distancing, sedikit banyak menimbulkan jarak secara emosional antara keluarga, sahabat, rekan kerja, teman, atau umat persekutuan di tempat ibadah yang dapat saling memberi dukungan. Bagi sebagian orang, hal ini bisa dirasakan sebagai suatu tekanan atau beban yang sangat besar. Bila tidak dikendalikan, tekanan tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan mental. Namun, walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan jaga jarak saat pandemi, segala informasi tetap harus terserap oleh lapisan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan hak kepada rakyatnya untuk ..

- A. Berpendidikan
- B. Bekerja
- C. Berkomunikasi
- D. Hidup
- E. Mendapatkan rasa aman

35. Meskipun tingkat ekspor kita masih kalah jauh dari negara-negara

seperti China dan Jepang, Indonesia juga punya banyak produk berkualitas yang sukses menembus pasar luar negeri. Bukan cuma dipasarkan ke negara-negara tetangga, produk seperti Indomie bahkan laris manis di puluhan negara. Sampai dibuatkan pabrik di belasan negara juga. Salah satunya adalah Indomie, Bisa dibilang Indomie adalah produk Indonesia yang paling laris manis di pasaran internasional. Merek mi instan ini diekspor di lebih dari 80 negara. Belasan pabriknya berada di belasan negara, termasuk Mesir, Arab Saudi, Nigeria, Turki, dan Serbia. Bangga menggunakan produk dalam negeri termasuk pengamalan sila ke ...

- A. Satu
- B. Dua
- C. Tiga
- D. Empat
- E. Lima

36. Pada tanggal 19 Juli 2021, nilai tukar rupiah melemah di awal pekan ini. Bahkan, kurs rupiah kembali bergerak di atas Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah spot berada di Rp 14.525 per dolar AS. Kurs rupiah spot ini melemah 0,19% dari posisi akhir pekan lalu pada Rp 14.498 per dolar AS. Pelemahan kurs rupiah ini beriringan dengan pergerakan mata uang Asia yang mayoritas melemah. Dari berbagai mata uang Asia, hanya yen Jepang yang menguat terhadap the greenback. Sementara pelemahan paling dalam mata uang di Asia adalah won yang tertekan 0,54%.

Pelemahan won berturut-turut disusul oleh peso, ringgit, baht, dan dolar Taiwan. Persentase pelemahan kurs rupiah berada di belakang dolar Taiwan. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia yaitu ...

- A. Menukar rupiah dengan mata uang asing
- B. Menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli
- C. Melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat
- D. Menggunakan dolar sebagai alat
- E. Menabung uang dan tidak melakukan tindakan konsumtif

37. Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,, diatur dengan memperhatikan ...

- A. keistimewaan daerah
- B. kekhususan dan keragaman daerah
- C. kepentingan daerah

- D. kepentingan nasional
- E. kepentingan daerah dan nasional

38. Masih ingat dengan kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam, sangat menghebohkan publik, yang berujung maut itu. Bahkan persidangannya pun sampai ditayangkan secara langsung oleh hampir semua stasiun televisi di Indonesia. Jessica merupakan terpidana kasus kopi Vietnam yang meracuni sahabatnya sendiri Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meneguk kopi vietnam yang telah dipesan Jessica Wongso di Kafe Olivier, pada 6 Januari 2016 lalu. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Akibat perbuatannya wanita cantik ini divonis hukuman 20 tahun penjara, karena dinilai terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana. Pada kasus pembunuhan berencana maupun tidak berencana, pelaku akan mendapatkan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia menghargai hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila terutama sila ke ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

39. Pancasila merupakan konsep pemikiran yang diciptakan dari kepribadian bangsa Indonesia dengan tujuan dan fungsi tertentu. Sejak 1 Juni 1945, Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Setiap silanya memiliki nilai kehidupan yang harus diamalkan semua warga negara Indonesia. Maksud dari pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan nasional adalah ...

- A. Pertumbuhan ekonomi adalah tumpuan dari pembangunan yang lain
- B. Pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat
- C. Pembangunan nasional secara mandiri
- D. Pancasila menjadi penentu pembangunan nasional
- E. Pancasila dijadikan dasar dari seluruh aspek pembangunan nasional

40. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-75 tahun lalu. Tak seperti peringatan di tahun-tahun sebelumnya yang digelar meriah di lokasi terbuka dengan mengundang warga, kali ini peringatan digelar secara virtual di Istana Negara, mengingat situasi pandemi COVID-19 (Corona). Upacara HUT TNI ke-75 dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai inspektur upacara. Upacara disiarkan live di YouTube Sekretariat Presiden. Seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, kini berkubang dalam

perang melawan COVID-19, musuh tak kasatmata yang memorak-porandakan hampir semua tatanan kehidupan. Jokowi lantas mengapresiasi peran TNI selama ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari membantu mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan hingga ikut menegakkan aturan di daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Setiap peristiwa penting di Indonesia akan diperingati sebagai hari peringatan bahwa bangsa Indonesia didirikan dengan tumpahan darah dari pahlawan. Salah satunya adalah Hari Tentara Nasional Indonesia yang selalu diperingati setiap tahunnya. Peringatan hari tersebut diperingati berdasarkan peristiwa pembentukan ...

- A. Badan Keamanan Rakyat
- B. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- C. Tentara Indonesia
- D. Tentara Keamanan Rakyat
- E. Tentara Republik Indonesia

41. Perhatikan kalimat berikut ini:

Makanan yang telah _____ tidak boleh dikonsumsi karena bisa menyebabkan masalah kesehatan.

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. kedaluwarsa
- B. kadaluarsa
- C. kadaluwarsa
- D. kedhaluwarsa
- E. kedhaluarsa

42. Perhatikan kalimat berikut ini:

Listrik di rumah ini sering _____ saat cuaca hujan deras.

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. khorsleting
- B. korsletting
- C. korsleting
- D. korslleting
- E. konsleting

43. Perhatikan kalimat berikut ini:

Setelah menyelesaikan program sarjana, Sarah memutuskan untuk melanjutkan studinya di tingkat _____ di luar negeri.

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. pasca sarjana
- B. pascasarjana
- C. paska sarjana
- D. pasksarjana
- E. pascsarjana

44. Perhatikan kalimat berikut ini:

Ibu kakek sedang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit _____

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. reumatik
- B. reumatika
- C. rheumatik
- D. rematik
- E. reumatikk

45. Perhatikan kalimat berikut ini:

Pada suatu hari panas, suhu di luar mencapai 30 derajat _____ menurut pengukuran termometer khusus.

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. reaumur
- B. reoemur
- C. reomurt
- D. reamur
- E. reomeur

46. Perhatikan kalimat berikut ini:

Penggunaan pedoman ini sangat penting dalam [standarisasi/standardisasi] proses produksi.

Pilih kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat dalam teks paragraf di atas....

- A. standarisasi
- B. standardisasi
- C. standharisasi
- D. standalisasi
- E. standarisasis

47. Kata dibawah ini yang penulisannya benar dan sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia adalah....

- A. Afdol
- B. Coklat
- C. Ambulan
- D. Amendemen
- E. Jum'at

48. Kata-kata dibawah ini yang penulisannya benar adalah....

- A. Analisis, dekret, geladi
- B. Analisis, dekrit, gladi

- C. Analisa, dekrit, gladi
- D. Analisa, dekret, geladi
- E. Analisis, dekret, gladi

49. Kata-kata dibawah ini yang sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia adalah....

- A. Nopember, Notulen, Orisinil
- B. November, Notulen, Orasinil
- C. Notulen, Organisasi, Orisanil
- D. Organisasi, Notula, Orisinal
- E. Nopember, Organisasi, Notulen

50. Bacalah kalimat berikut ini:

"Kepada penumpang yang terhormat Garuda Indonesia dengan _____penerbangan Q5367 dari Bali telah mendarat._____"

Istilah baku yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah

- A. Nomer, Terimakasih
- B. Nomer, Terima Kasih
- C. Nomor, Terimakasih
- D. Nomor, Terima Kasih
- E. Nomore, Terimakasih

PEMBAHASAN LATIHAN TRYOUT TKD WAWASAN KEBANGSAAN BUMN

1. Pembahasan:

Tindakan Budi mengingatkan temannya tentang pentingnya menghormati simbol-simbol nasional pada saat upacara bendera menunjukkan semangat nasionalisme.

JAWABAN: E

2. Pembahasan:

Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Meskipun tidak secara eksplisit menentang ideologi tertentu seperti komunisme, liberalisme, etnosentrisme, atau chauvinisme, namun gerakan nasionalisme Indonesia cenderung lebih fokus pada perjuangan melawan penjajahan dan dominasi asing.

JAWABAN: D

3. Pembahasan:

Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan

perbedaan dalam bidang ekonomi disebut sebagai demokrasi material. Demokrasi material menekankan pada hak asasi ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Demokrasi material juga menuntut redistribusi kekayaan dan kesempatan dalam masyarakat, sehingga tercipta kesetaraan dalam hal ekonomi.

JAWABAN: B

4. Pembahasan:

Nasionalisme merupakan faktor penentu berhasil tidaknya suatu negara dalam mewujudkan cita-citanya. Cita-cita suatu negara bisa berupa pembangunan ekonomi yang maju, kesejahteraan rakyat yang merata, kemajuan teknologi, pengembangan budaya, atau cita-cita lain yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nasionalisme yang kuat dapat memperkuat semangat untuk mencapai

cita-cita tersebut, mengatasi rintangan dan tantangan yang dihadapi, serta mempersatukan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, nasionalisme menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita suatu negara.

JAWABAN: C

5. Pembahasan:

Nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarkis yang tercipta akibat kebijakan dan politik Etis Belanda yang menempatkan bumi putera pada golongan kedua. Dalam sistem tersebut, orang Eropa dianggap sebagai golongan yang lebih unggul, sementara pribumi ditempatkan pada golongan yang lebih rendah. Sistem ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang meluas, dan memicu perlawanan dari kalangan bumi putera untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Hal ini memperkuat nasionalisme bangsa Indonesia, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya gerakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

JAWABAN: B

6. Pembahasan:

Menurut KPK, terdapat sembilan nilai integritas, yaitu:

- > Jujur
- > Peduli
- > Mandiri
- > Disiplin

- > Tanggung jawab
- > Kerja keras
- > Sederhana
- > Berani
- > Adil

Maka berdasarkan soal no 11, nilai sikap integritas yang dapat dicontoh dan diambil dari sosok Artidjo Alkostar adalah Jujur, berani, dan adil.

Jadi jawaban untuk soal ini adalah B

JAWABAN: B

7. Pembahasan:

Penjelasan: Seperti yang kita tahu seorang pegawai negeri sipil harus berintegritas tinggi. Integritas adalah salah satu prinsip penting yang mengedepankan kejujuran, keadilan, juga profesionalisme, dan menolak tindakan tidak etis adalah langkah baik dalam menjaga integritas.

Jadi jawaban untuk soal ini adalah C

JAWABAN: C

8. Pembahasan:

Pada mulanya institusi Polri berada di bawah Depdagri sampai pada akhirnya menjadi institusi sipil yang berkedudukan di bawah Presiden. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri berada di bawah kendali komando Presiden.

JAWABAN: C

9. Pembahasan:

Integritas mencakup sikap kejujuran, kejujuran dalam tindakan, dan ketegasan dalam memegang nilai-nilai yang dianggap benar. Dalam konteks ini, Raya ingin menyuarakan tuntutan siswa terkait fasilitas sekolah yang kurang memadai. Partisipasi dalam demonstrasi, meskipun ada risiko konsekuensi, adalah langkah yang mencerminkan fungsi integritas dengan mendukung nilai-nilai yang dianggap benar.

Pilihan B (tidak berpartisipasi dalam demonstrasi) mungkin menghindari konsekuensi, tetapi mungkin tidak mencerminkan integritas jika Raya merasa bahwa tindakan itu adalah yang benar.

Pilihan C (berbicara dengan kepala sekolah) adalah langkah yang baik dalam menyelesaikan masalah, tetapi tidak selalu menggantikan peran demonstrasi sebagai cara untuk menyuarakan tuntutan siswa.

Pilihan D (melaporkan kepada media) mungkin efektif tetapi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena konsekuensinya.

Pilihan E (mencari cara untuk memengaruhi kebijakan sekolah) adalah pendekatan yang baik tetapi tidak selalu menggantikan tindakan demonstrasi yang langsung dan nyata.

Dalam banyak situasi, mengejar fungsi integritas mungkin melibatkan pengambilan risiko demi nilai-nilai yang diyakini.

JAWABAN: A

10. Pembahasan:

Tugas yang diberikan guru kepada murid-muridnya agar tanaman tersebut tetap terawat merupakan salah satu upaya dari penerapan rasa tanggung jawab sedari dini, yang harus ada pada diri setiap anak penerus bangsa karena bertujuan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh.

JAWABAN: D

11. Pembahasan:

Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada Tujuan Nasional, Kebijakan Terpadu, Doktrin dan Strategi, serta Konstelasi Geografis dan Demografis Indonesia.

JAWABAN: B

12. Pembahasan:

Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

JAWABAN: A

13. Pembahasan:

Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna wawasan kebangsaan.

JAWABAN: B

14. Pembahasan:

Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang mencakup kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
- b. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
- c. Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal-an, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

JAWABAN: B

15. Pembahasan:

Ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan

rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara, melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat diatur dalam TAP MPR No. IV/ MPR/ 1999.

JAWABAN: C

16. Pembahasan:

Contoh persamaan kedudukan warga negara dalam lingkungan masyarakat adalah membayar pajak tepat waktu. Dalam hal ini, persamaan kedudukan terletak pada persamaan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

JAWABAN: B

17. Pembahasan:

Desi menggunakan analogi keranjang buah dengan lima jenis buah yang berbeda di dalamnya untuk menjelaskan Pancasila. Masing-masing buah mewakili prinsip atau pedoman yang berbeda namun menjadi satu dalam keranjang. Oleh karena itu, jawabannya adalah Dasar yang memiliki lima unsur (b).

JAWABAN: B

18. Pembahasan:

Sila kedua berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" sehingga dengan menerapkan sila kedua dapat

mewujudkan keseimbangan, mewujudkan kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang.

JAWABAN: B

19. Pembahasan:

Indonesia yang terbentang luas dan memiliki berbagai macam wilayah dan budaya berarti kaya akan bahasa. Dalam satu Provinsi saja bisa memiliki puluhan bahkan ratusan bahasa yang berbeda. Selain bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu, ia juga digunakan sebagai penghubung bahasa antar daerah, dan antar budaya, sehingga makna yang dimaksud oleh masing-masing individu mampu tersampaikan dengan baik dan jelas. Maka jelaslah jawaban yang tepat ialah sebagai penghubung antar daerah.

JAWABAN: C

20. Pembahasan:

Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip moral, sosial, dan politik, termasuk prinsip keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan yang adil dan memastikan hak dan kewajiban yang setara untuk semua warga negara.

- > Dalam konteks penyelesaian konflik di desa, solusi yang tepat adalah melibatkan kedua kelompok untuk berunding dan mencari solusi yang mematuhi prinsip

keadilan Pancasila. Ini mencakup mendengarkan dan menghormati pandangan dan kepentingan masing-masing kelompok dan mencari kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.

- > Jawaban A (mendominasi), B (menerima ketidakadilan), D (campuran pemerintah), dan E (melupakan perbedaan) tidak mencerminkan prinsip keadilan Pancasila dan mungkin tidak menghasilkan solusi yang adil. Jadi, jawaban C adalah yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.

JAWABAN: C

21. Pembahasan:

Pemakaian tanda koma (,) yang salah terdapat dalam kalimat opsi (B) karena tanda koma (,) seharusnya dihilangkan. Tanda (,) tidak berfungsi untuk memisahkan subjek dengan predikat.

JAWABAN: B

22. Pembahasan:

Penggalan kalimat Wajib pajak juga memberi keterangan lisan dan/atau tertulis memiliki maksud Baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis atau salah satu dari keterangan tersebut diberikan oleh orang yang menyetor pajak.

JAWABAN: C

23. Pembahasan:

Salah satu kalimat dalam paragraf di atas yang tidak mendukung pokok pikiran paragraf adalah kalimat kelima karena membicarakan flu burung, sedangkan kalimat yang lain tidak.

JAWABAN: E

24. Pembahasan:

Bentuk kalimat baku adalah kalimat yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang telah dibakukan. Kalimat baku harus sesuai dengan tata bahasa, makna, dan ejaan.

JAWABAN: B

25. Pembahasan:

Anak kalimatnya: "bahwa bajunya sudah selesai" menjadi objek dari kata "menyampaikan".

JAWABAN: C

26. Pembahasan:

Jepang mengalami kekalahan pada saat melawan sekutu, sehingga mereka mencoba menarik simpati Indonesia untuk membantu mereka melawan sekutu dengan cara menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia.

JAWABAN: B

27. Pembahasan:

Diculiknya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok adalah agar Jepang tidak dapat mempengaruhi

lagi karena golongan muda merasa golongan tua mendapatkan pengaruh dari Jepang untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan.

JAWABAN: E

28. Pembahasan:

Dampak Perilaku Nepotisme

- > Diskriminasi kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang. Pada akhirnya hal tersebut akan mengakibatkan turunnya motivasi kerja dan kinerja mereka yang masuk melalui jalur rekrutmen resmi.
- > Muncul konflik loyalitas dalam organisasi, khususnya jika anggota keluarga menempati posisi sebagai pengawas langsung di atas anggota keluarga yang lainnya dalam perusahaan.
- > Ketidakadilan terus menerus yang dirasakan orang lain yang seharusnya berkesempatan mengembangkan karir.
- > Timbulnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat, dimana untuk mendapatkan pekerjaan atau posisi tertentu bukan lagi melalui persaingan dan prosedur, tetapi dengan cara nepotisme

Yang bukan termasuk dampak dari perilaku nepotisme adalah pilihan B yaitu Meningkatnya motivasi kerja dan kinerja mereka yang masuk melalui jalur rekrutmen resmi

JAWABAN: B

29. Pembahasan:

Berdasarkan kesepakatan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Namun, pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang, pembacaan teks proklamasi Kemerdekaan diselenggarakan di rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur NO. 56, Jakarta. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, proses proklamasi pun dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

JAWABAN: B

30. Pembahasan:

Makna pernyataan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah waktu yang tepat untuk membangun kehidupan baru yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

JAWABAN: D

31. Pembahasan:

Tujuan dari Ir. Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura adalah guna membicarakan perihal kemerdekaan Indonesia dan ingin mengetahui bagaimana sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia.

JAWABAN: B

32. Pembahasan:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politis bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

JAWABAN: E

33. Pembahasan:

Golongan Tua adalah golongan yang dimana anggotanya adalah pejuang yang sudah tua, seperti Ir. Soekarno, Mr. Ahmad Soebardjo, Drs. Mohammad Hatta, K. H. Mas Mansyur, Ki Hajar Dewantara, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Golongan Muda adalah golongan yang dimana anggotanya adalah para pemuda, anggotanya seperti Chairul Saleh, Adam Malik, Sukarni, Wikana, Syarif Thayeb, dan Sayoko.

JAWABAN: C

34. Pembahasan:

Walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan jaga jarak selama masa pandemi, segala informasi tetap harus terserap oleh lapisan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan hak kepada rakyatnya untuk Berkomunikasi.

JAWABAN: C

35. Pembahasan:

Butir sila ke-3 "cinta bangsa dan tanah air serta bangga sebagai Bangsa Indonesia".

JAWABAN: C

36. Pembahasan:

Saat Nilai tukar rupiah melemah sebaiknya kita harus lebih berani menggunakan mata uang rupiah. Kita harus yakin dan terus menggunakan mata uang rupiah dan tidak ikut menukarkan ke Dollar yang mana akan memperburuk nilai Rupiah. Cepat atau lambat, nilai mata uang ini akan kembali menguat. Saat nilai tukar Dollar meningkat, banyak dari masyarakat Indonesia yang menukarkan Rupiah mereka dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hal ini semakin menekan nilai tukar Rupiah. Maka dari itu, kita semua perlu memupuk rasa nasionalisme yang kuat agar tidak ikut tergoda mengambil keuntungan dari penurunan nilai Rupiah tersebut.

JAWABAN: B

37. Pembahasan:

Pasal 18A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

JAWABAN: B

38. Pembahasan:

Pada kasus pembunuhan terencana maupun tidak terencana, pelaku akan mendapatkan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia menghargai hak hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila terutama sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

JAWABAN: B

39. Pembahasan:

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. artinya pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang

berfungsi sebagai acuan. Pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

JAWABAN: E

40. Pembahasan:

Banyak negara di dunia memperingati Hari Angkatan Bersenjata atau sejenisnya untuk menghormati kekuatan militer mereka. Di Indonesia, peristiwa pembentukan Tentara Keamanan Rakyat diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia setiap tanggal 5 Oktober.

JAWABAN: D

41. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "kedaluwarsa," yang merujuk pada makanan atau barang yang telah melewati tanggal kedaluwarsa atau tidak layak untuk digunakan lagi. "Kadaluwarsa" adalah bentuk yang kurang tepat. Sehingga, pilihan yang benar adalah A. kedaluwarsa.

JAWABAN: A

42. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "korsleting," yang merujuk pada gangguan dalam aliran listrik yang terjadi biasanya karena kontak pendek. "Konsleting" adalah bentuk yang tidak benar. Sehingga, pilihan yang benar adalah C. korsleting.

JAWABAN: C

43. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "pascasarjana," yang merujuk pada program studi tingkat lanjut yang diambil setelah menyelesaikan program sarjana. "Pasca sarjana" adalah bentuk yang kurang tepat. Sehingga, pilihan yang benar adalah B. pascasarjana.

JAWABAN: B

44. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "reumatik," yang merujuk pada penyakit atau masalah kesehatan yang berhubungan dengan sistem otot dan persendian. "Reumatika" adalah bentuk yang kurang tepat. Sehingga, pilihan yang benar adalah A. reumatik.

JAWABAN: A

45. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "reamur," yang merupakan satuan pengukuran suhu yang digunakan terutama di Prancis dan beberapa negara lainnya. "Reoemur" atau "reamur" adalah bentuk yang kurang tepat. Sehingga, pilihan yang benar adalah A. reamur.

JAWABAN: A

46. Pembahasan:

Kata yang benar dalam Bahasa Indonesia adalah "standarisasi," yang merujuk pada proses pengembangan dan implementasi standar atau pedoman

tertentu dalam suatu proses atau produk. "Standarisasi" adalah bentuk yang kurang tepat. Sehingga, pilihan yang benar adalah B. standardisasi.

JAWABAN: B

47. Pembahasan:

Kata yang benar adalah Amendemen

Afdol = Afdal

Coklat = Cokelat

Ambulan = Ambulans

Jum'at = Jumat

JAWABAN: D

48. Pembahasan:

Kata yang baku adalah Analisis, dekret, geladi

JAWABAN: A

49. Pembahasan:

Kata baku yang benar sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia adalah Organisasi, Notula, Orisinal

Nopember = November

Notulen = Notula

Organisir = Organisasi

Orisinil = Orisinal

JAWABAN: D

50. Pembahasan:

Kalimat baku yang benar adalah Nomor, Terima Kasih

JAWABAN: D